



SALINAN

LURAH SUMBERAGUNG
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SUMBERAGUNG
NOMOR 07 TAHUN 2023

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sumberagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran

2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perianggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 155);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf

- Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
 25. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sumberagung Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2019 Nomor 04);
 26. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 08 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2020 Nomor 08);
 27. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2020 Nomor 09);
 28. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2021 Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2023 Nomor 05);
 29. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Sumberagung Sejahtera (Lembaran Kalurahan

- Sumberagung Tahun 2021 Nomor 10);
30. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan Sumberagung (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2022 Nomor 04);
 31. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kalurahan Sumberagung Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2023 Nomor 03);
 32. Peraturan Kalurahan Sumberagung Nomor 06 Tahun 2023 tentang Sewa Tanah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Sumberagung Tahun 2023 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERAGUNG
dan
LURAH SUMBERAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SUMBERAGUNG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan
perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	9.806.737.765,60
2. Belanja Kalurahan	Rp	10.690.748.458,00
Defisit	Rp	(884.010.692,40)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	884.010.692,40
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan (a-b)	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan; dan
- b. daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

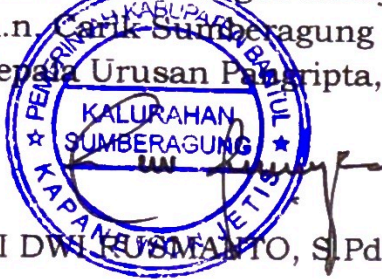
Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. Carik Sumberagung
Kepala Urusan Pangripta,



DESI DWI KUSMANTO, S.Pd.Si

Ditetapkan di Sumberagung
pada tanggal 29 Desember 2023
LURAH SUMBERAGUNG,
ttd.

YUDI FAHRUDIN

Diundangkan di Sumberagung
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK SUMBERAGUNG,

ttd.

ARIF

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERAGUNG KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 07

Noreg Peraturan Kalurahan Sumberagung Kapanewon Jetis
Kabupaten Bantul : (07/Sumberagung/2023)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUMBERAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	595.977.265,60	
	4.2.	Pendapatan Transfer	9.186.602.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	24.158.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	9.806.737.765,60	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	2.858.833.208,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.994.607.608,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.352.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	53.352.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	837.312.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	837.312.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.803.760,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	3.803.760,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	183.488.456,00	ADD PAD PBK
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.488.456,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	99.000.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	99.000.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	23.816.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.816.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	138.123.760,00	ADD PBH
	1.1.07 5.1.	Belanja Pegawai	14.009.760,00	
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.114.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	10.885.104,00	ADD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	10.885.104,00	
	1.1.91	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bamuskal	14.000.000,00	PAD
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	14.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Ba muskal	114.882.200,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	114.882.200,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan B amuskal	76.575.000,00	PBH
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	76.575.000,00	
1.1.96		Tunjangan Masa Kerja	57.600.000,00	PAD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	57.600.000,00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	94.674.768,00	ADD. PAD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	94.674.768,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	252.094.560,00	ADD
1.1.98	5.1	Belanja Pegawai	252.094.560,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	200.230.600,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	83.515.500,00	DLL. PBK
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	83.515.500,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	22.755.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.755.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	93.960.100,00	PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	93.960.100,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.489.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Penitakhiran Profil Desa **)	1.980.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	600.000,00	PAD
1.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	17.909.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.909.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	602.346.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	34.120.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.120.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	30.020.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Berang dan Jasa	30.020.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaazn Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	42.644.500,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.644.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	22.065.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.065.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.105.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.105.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan)	21.300.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	10.815.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.815.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.455.000,00	PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.455.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	1.000.000,00	PBH
1.4.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	379.711.500,00	PAD, PBH, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	379.711.500,00	
1.4.90		Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorir	54.110.000,00	PAD, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.110.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	41.160.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	2.685.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.685.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	38.475.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.475.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.815.484.500,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	197.646.800,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	163.398.800,00	PBK
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	163.398.800,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	18.050.000,00	DDS
2.1.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.050.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	823.244.300,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	171.725.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	171.725.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	94.574.800,00	PBK
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.574.800,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.604.000,00	DLL
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.604.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	407.135.500,00	PBK
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	407.135.500,00	
2.2.92		Pembinaan Kampung KB	3.785.000,00	DDS
2.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.785.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	131.520.000,00	DDS
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	131.520.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	10.900.000,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.079.641.250,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	707.139.250,00	DDS, PBK, PBP
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	295.000.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	412.139.250,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	372.502.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	322.502.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	688.676.250,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	433.060.000,00	DDS, PBH, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	433.060.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	245.616.250,00	PBK
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	245.616.250,00	
2.4.90		Pengelolaan Pamsimas / Air Minum Kalurahan	10.000.000,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	23.273.900,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.875.000,00	DLL
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.875.000,00	
2.5.91		Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah	17.398.900,00	PBK
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.398.900,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	3.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	3.000.000,00	PBH
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	4.187.282.350,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	109.920.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	30.735.000,00	PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.735.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	1.800.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	31.090.000,00	DDS, PAD, PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.090.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	7.015.000,00	DDS, PAD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.015.000,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	33.615.000,00	DDS, PAD
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.615.000,00	
3.1.95		Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	5.665.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.665.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	247.298.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	8.115.000,00	DDS, PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.115.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	20.560.000,00	PAD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.560.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	204.873.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	204.873.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	13.750.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.728.877.100,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	5.625.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.625.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	69.206.300,00	DDS, PAD, PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.206.300,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	16.062.500,00	PAD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.062.500,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	3.552.053.500,00	DDS, PAD, PBP
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.700.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	3.515.353.500,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	85.929.800,00	DDS, PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.929.800,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	101.187.250,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	11.980.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.980.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	38.639.000,00	DDS, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.639.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	41.444.500,00	PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.444.500,00	
3.4.93		Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	9.123.750,00	PBK
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.123.750,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	363.525.400,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	51.925.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	51.925.000,00	DDS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.925.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	243.299.900,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	1.290.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.290.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	114.015.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.015.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	121.955.000,00	DDS, PBK
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	46.955.000,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	6.039.900,00	PBK
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.039.900,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.669.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.115.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.115.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.554.000,00	DLL
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.554.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	26.650.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	6.185.000,00	DDS, DLL
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.185.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	8.090.000,00	DDS, DLL
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.090.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	6.160.000,00	DDS, DLL
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.160.000,00	
4.4.96		Pembinaan/Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini	6.215.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.215.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.810.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.810.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.810.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	25.171.500,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	11.961.500,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	11.961.500,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	13.210.000,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.210.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>465.623.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	115.523.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	115.523.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.523.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	350.100.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	350.100.000,00	DDS
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	350.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6. 6.1.	JUMLAH BELANJA	10.690.748.458,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(884.010.692,40)	
		PEMBIAYAAN		
		Penerimaan Pembiayaan	884.010.692,40	
		PEMBIAYAAN NETTO	884.010.692,40	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sumberagung, 29 Desember 2023

Lurah Sumberagung

ttd.

Yudi Fahrudin, SE